Keistimewaan Sultan, Keistimewaan Yogyakarta

P Ari Subagyo

TANGGAL 12 April 2015 yang lalu merupakan peringatan kelahiran ke-103 mendiang Sri Sultan HB IX. Mengiringi peringatan *wiyosan ndalem*, diluncurkan buku 'A Prince in a Republic' karya John Monfries. Buku terbitan ISEAS Singapura (2015) ini semula disertasi di Australian National University.

Penulisnya doktor sejarah dan pensiunan diplomat Australia. John pernah bertugas di Indonesia, sangat mengenal Yogyakarta, serta fasih berbahasa Indonesia dan Jawa. Bahkan, istrinya perempuan asli Yogyakarta yang piawai menari dan membatik. John pun menjadi dosen tamu tentang diplomasi di UGM.

Kiprah John Monfries (dan istrinya) dalam diplomasi budaya sungguh menarik. Namun, yang lebih menarik tentulah isi dan amanat bukunya. Apa keistimewaan Sultan HB IX? Apa amanat bagi penerus dinasti kesultanan sekarang dan mendatang?

KR-JOKO SANTOSO

Komitmen kepada NKRI

'A Prince in a Republic' merupakan sebuah biografi politik. Buku ini memaparkan pergulatan Sultan HB IX dalam memilih jalan politiknya. Pilihan menjadi rumit karena *beliau* Raja Yogyakarta. Pilihan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga bagi kraton dan rakyat Yogyakarta.

Pilihan menghadang ketika *beliau* (saat itu BRM Dorojatun) harus menggantikan ayahandanya yang wafat pada 22 Oktober 1939. Pilihannya : tetap menikmati perlakuan khusus dari penjajah Belanda maupun Jepang, atau turut memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dorojatun memilih yang kedua.

Sikap itu ditunjukkan sejak sebelum penobatan 18 Maret 1940. November 1939 hingga Februari 1940 beliau terlibat perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda yang diwakili Gubernur LA Adam. Belanda menghendaki dibentuknya Balai Agung yang tugasnya menasihati Sultan. Gagasan itu tidak sepenuhnya ditolak Dorojatun. Yang diperdebatkan adalah cara pengisian anggotanya. Belanda mengusulkan anggota Balai Agung ditentukan Gubernur bersama Sultan. Namun, Dorojatun mengusulkan anggota dipilih langsung dari dan oleh rakyat. Kengototan Dorojatun tidak hanya menggagalkan pembentukan Balai Agung, namun juga memperlihatkan sikap demokratis dan antipenjajahan.

Sultan pun pernah dirayu agar tidak mendukung kemerdekaan. Imbalannya seluruh Jawa dan Madura menjadi wilayah Kesultanan Yogyakarta. Namun, Sultan menolak, dan justru aktif membantu kemerdekaan Indonesia.

Begitupun pasca-17 Agustus 1945, Sultan kembali harus memilih: tetap mempertahankan Yogyakarta sebagai negeri berdaulat atau bergabung dengan NKRI. Lewat Maklumat 5 September 1945, Sultan (dan Paku Alam VIII) memilih yang kedua.

Dalam keseluruhan wilayah NKRI, Yogyakarta memang kecil. Namun, secara eksistensial, Yogyakarta sungguh penting bagi NKRI. Itu terbukti ketika Belanda (pasca-agresi kedua) berusaha memecah-mecah Indonesia menjadi negara-negara bagian dalam federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sultan menyatakan Yogyakarta tetap satu-kesatuan dengan NKRI. Demikianlah, Sultan telah mewakafkan wilayah dan rakyat Yogyakarta demi membentuk dan mempertahankan NKRI. Komitmen kepada NKRI inilah keistimewaan Sultan HB IX..

Menjadi Sultan yang Istimewa

Menurut John Monfries, komitmen Sultan kepada NKRI merupakan wujud nyata 'tahta untuk rakyat'. Bayangkan, apa jadinya jika Sultan tak mendukung kemerdekaan? Apa jadinya jika Sultan tidak mewakafkan wilayah dan rakyatnya? Apa jadinya jika Sultan memilih jalan lain? NKRI tidak mungkin terbentuk dan bertahan.

Pernyataan itu bagi sebagian pihak terasa berlebihan karena memitoskan Sultan. Bahkan ada tudingan bahwa mewakafkan Yogyakarta untuk menjamin keberadaan kraton beserta hak-hak istimewanya. Atau karena Sultan ingin meraup kekuasaan lebih besar setelah Indonesia merdeka. Namun, tudingan semacam itu mudah dipatahkan. Sultan terus-menerus membuktikan pengorbanannya untuk NKRI demi mewujudkan 'tahta untuk rakyat'. Maka 'tahta untuk rakyat' merupakan keistimewaan Sultan HB IX; Dan keistimewaan Sultan HB IX mendasari keistimewaan Yogyakarta.

Mengenai keistimewaan Sultan HB IX, John Monfries mendaftar julukan yang layak dilekatkan kepada beliau, yaitu 'Napoleon-nya Indonesia', 'bukan sosok politis', 'bukan intelektual tetapi memiliki intuisi kuat', 'patriot dengan semangat demokrasi'. Juga 'pemimpin Jawa yang dipercaya dan ditaati oleh masyarakat non-Jawa', dan 'ikon penyelesaian masalah'. Dinyatakan pula, Sultan HB IX begitu piawai memadukan dunia tradisional Jawa dengan nilai-nilai modern Barat.

Itulah amanat bagi para penerus dinasti Kesultanan Yogyakarta sekarang dan mendatang. Masyarakat berharap persoalan suksesi, gubernur, tata ruang, pembangunan bandara, dan sebagainya ditangani secara bijaksana demi mewujudkan 'tahta untuk rakyat' dan keistimewaan Yogyakarta. ❑ - s.

*) ***Dr P Ari Subagyo MHum,***
Dosen Fakultas Sastra USD Yogyakarta.

Maksimum 600 Kata

PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com